



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 188.45/10/Kpts/Huk/2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan perkara dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing, serta ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

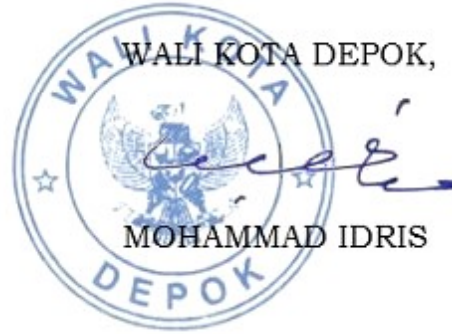
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Januari 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 188.45/10/Kpts/Huk/2025
TANGGAL : 8 Januari 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN WALI KOTA TAHUN 2025

NO.	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1.	Pedoman Pengawasan Dan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.	Pedoman Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Hak Akses Arsip Dinamis	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4.	Prosedur Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	Badan Keuangan Daerah
5.	Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2018 tentang Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Depok	Dinas Perhubungan
7.	Penyelenggaraan Pemagangan Kerja Di Dalam Negeri Bagi Pencari Kerja Di Kota Depok	Dinas Tenaga Kerja
8.	Penyelenggaraan, Pengawasan, Dan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Melalui PREDIKSI	Dinas Sosial
9.	Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
10.	Petugas Pengawas Kawasan Tanpa Rokok atau Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan
11.	Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
12.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemkot Depok Tahun Anggaran 2025	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
13.	Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah Depok Tahun Anggaran 2026	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
14.	Analisis Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2026	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
15.	Harga Satuan Pokok Kegiatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2026	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
16.	Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Dinas dan/atau Kendaraan Alat Berat	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
17.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu	Badan Keuangan Daerah

NO.	RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
18.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah	Badan Keuangan Daerah
19.	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame	Badan Keuangan Daerah
20.	Target Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah
21.	Pemeriksaan Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah
22.	Insentif Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah
23.	Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24.	Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Puskesmas	Dinas Kesehatan
25.	Perubahan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A Pada Dinas Kesehatan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 Pada Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
26.	Rencana Aksi Daerah Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan
27.	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan
28.	Gerakan Masyarakat (Germas)	Dinas Kesehatan
29.	Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Kota Depok	Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Depok

WALI KOTA DEPOK,

MOHAMMAD IDRIS